



Media: BERNAS

Hari: Sabtu

Tanggal: 13 Februari 2016

Halaman: 10

### Pemkot Genjot Konsumsi Ikan

UMBULHARJO -- Pemerintah Kota Yogyakarta terus berusaha meningkatkan konsumsi ikan, salah satunya dengan mengembangkan fasilitas di kompleks Pasar Ikan Higienis Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan ikan.

"Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Yogyakarta masih rendah dan jauh di bawah rata-rata angka nasional. Oleh karena itu, diperlukan berbagai cara agar tingkat konsumsi bisa digenjot. Salah satunya dengan mengembangkan fasilitas untuk mendukung pemenuhan kebutuhan ikan masyarakat," kata Kepala Bidang Pertanian Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogyakarta Benny Nurhantoro di Balaikota Timoho, Jogja, Jumat (12/2).

Berdasarkan data, tingkat konsumsi ikan masyarakat Kota Yogyakarta pada 2013 tercatat sebanyak 21,71 kilogram per kapita per tahun atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional yang mencapai 35 kilogram per kapita per tahun.

Benny menambahkan, rata-rata konsumsi ikan masyarakat tidak meningkat secara drastis dan pada tahun lalu mencapai sekitar 23 kilogram per kapita per tahun, sedangkan rata-rata nasional sudah mencapai 38 kilogram per kapita per tahun.

Benny menyebut, jika masyarakat dapat memperoleh ikan dengan mudah dan jenis yang beragam, maka konsumsi ikan bisa meningkat cukup tinggi.

"Sebenarnya, hasil budidaya ikan di DIY cukup baik yaitu 71.000 ton per tahun, namun ikan tangkap justru kecil yaitu 5.000 ton per tahun. Seharusnya, hasil ikan tangkap bisa dua kali lipat dibanding ikan budidaya," katanya.

Sementara itu, fasilitas pendukung di Pasar Ikan Higienis yang akan dibangun berupa mesin pendingin, mesin pembeku dan pencetak es. Mesin pendingin mampu menampung sekitar 100 ton ikan. Fasilitas tersebut rencananya dibangun mulai Maret memanfaatkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Setelah fasilitas tersebut terbangun, pengelolaan akan diserahkan ke Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) DIY yang dibentuk oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Perikanan dan Kelautan.

KTNA juga akan langsung menerapkan sistem logistik ikan nasional (SLIN) sehingga daerah yang kelebihan pasokan ikan bisa mendistribusikannya ke daerah yang kekurangan ikan. KTNA juga akan tejun ke nelayan di DIY agar hasil tangkapan lebih diutamakan untuk memenuhi kebutuhan di DIY.

Pada pertengahan Februari, pengelolaan PIH sudah diserahkan ke pihak ketiga dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Namun Benny menyebut hal tersebut tidak akan berpengaruh pada proses pengelolaan fasilitas pendingin ikan.

"Pihak ketiga hanya memanfaatkan gedung utama dan pemancinan saja. Sedangkan fasilitas dibangun di luar gedung utama," katanya.

Keberadaan fasilitas tersebut, lanjut Benny, justru akan mendukung pihak ketiga untuk memperoleh ikan segar karena bergerak di bidang kuliner olahan ikan. (\*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005